

**Peran TNI dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat
Indonesia-Malaysia
(Studi Kasus Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS
Periode Maret 2019– November 2019)**

Agus Subagyo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah ini sangat rawan terjadinya berbagai pelanggaran batas wilayah. TNI sebagai alat pertahanan negara wajib melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan. Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS merupakan satuan TNI AD yang diberikan tugas untuk mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dengan wilayah penugasan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, mulai 1 Maret 2019–30 November 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori peran, dimana peran terbagi menjadi peran aktif dan peran partisipatif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia diwujudkan dengan peran aktif dan peran partisipatif. Peran aktif berupa pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman militer dan non-militer, seperti pengamanan patok batas, pengamanan yang dilakukan satgas pamtas terhadap kejahatan transnasional, *illegal logging*, *illegal mining*, kejahatan narkoba, penyelundupan barang. Peran partisipatif berupa kegiatan sosial kemanusiaan (*civic mission*) yang dilakukan satgas pamtas dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang infrastruktur, sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan.

Kata kunci: peran, TNI, perbatasan darat, Indonesia-Malaysia

Abstract

The land border between Indonesia and Malaysia is in the Province of West Kalimantan, East Kalimantan, and North Kalimantan. This region is very prone to various violations of territorial boundaries. The Indonesian Military as a means of national defense is obliged to carry out security against border areas. The task force of Raider Infantry Battalion 301/PKS is an army unit assigned to secure the Indonesia-Malaysia land border area, with assignment areas in West Kalimantan Province, specifically in Sanggau, Sintang, and Kapuas Hulu Regencies, starting March 1, 2019-30 November 2019. The purpose of this study is to analyze the role of the task force of Raider Infantry Battalion in securing the Indonesia-Malaysia land border area. The theoretical framework used is role theory, where roles are divided into active roles and participatory roles. The study was conducted using qualitative methods, through data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies. The results showed that the role of the task force of Raider Infantry Battalion 301/ PKs in securing the Indonesia-Malaysia land border area was realized with an active and participatory role. An active role in the form of securing border areas from military and non-military threats, such as security carried out by the task force for transnational crime, illegal logging, illegal mining, drug crimes, smuggling of goods. Participatory role in the form of humanitarian social activities (civic mission) carried out by the task force in the field of education, health sector, social field, and infrastructure, so it is very much felt by the people in the border areas.

Keywords: border, Indonesian military, role, Indonesia-Malaysia

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hubungan internasional, persoalan perbatasan menjadi kajian yang mengemuka dan strategis mengingat meningkatnya konflik perbatasan dan sengketa wilayah perbatasan yang memicu ketegangan, kekerasan, dan peperangan antarnegara. Dari aspek wilayah perbatasan, Indonesia berbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ketiga wilayah perbatasan darat Indonesia ini sangat rawan terjadinya berbagai ancaman, baik ancaman tradisional/konvensional maupun ancaman modern/non-konvensional, mulai dari perusakan/pemindahan batok batas, infiltrasi asing, pelintas batas tradisional, maupun kejahatan transnasional, seperti *illegal logging*, *illegal mining*, *drug trafficking*, *human trafficking*, *smuggling*, dan *illegal trading* (Yani & Nizmi, 2018).

Salah satu wilayah perbatasan darat yang rentan terjadinya pelanggaran kedaulatan negara dan kejahatan transnasional adalah wilayah Pulau Kalimantan. Kalimantan memiliki tiga provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Serawak, Malaysia, yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan ini terdiri dari lembah, sungai, gunung, perbukitan, dan hutan, yang sulit sekali dijangkau oleh transportasi darat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Seskoad (2007: 12), banyak jalan-jalan "tikus" menuju ke wilayah perbatasan sehingga potensial terjadinya aksi infiltrasi asing dan beragam kejahatan transnasional dengan berbagai modus operandi yang kompleks dan rumit.

Wilayah perbatasan merupakan cerminan keamanan nasional dan kedaulatan negara yang harus dijaga, dipelihara, dan dipertahankan dari berbagai ancaman (Sidratahta, 2016: 19). Dalam perspektif pertahanan negara,

wilayah perbatasan merupakan aspek vital untuk menghadang musuh yang masuk dari luar, terlebih lagi perbatasan darat. Perbatasan darat Indonesia-Malaysia merupakan wilayah vital dan strategis untuk dilakukan pengamanan untuk menunjukkan bahwa negara hadir di wilayah perbatasan untuk mengamankan setiap warga negara Indonesia (Muhtadi, 2017: 16). Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari luar/ eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, di Pasal 7, ayat 2, dinyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana salah satu wujud OMSP tersebut adalah mengamankan wilayah perbatasan. Implementasi dari amanat UU TNI untuk mengamankan wilayah perbatasan adalah menggelar pasukan di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dalam bentuk Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), dengan tugas yang bersifat temporer, dalam kurun waktu tertentu, yang dikirimkan secara bergiliran dari satuan batalyon, yang terpilih secara selektif, untuk menjalankan misi pengamanan perbatasan darat.

Salah satu satuan Batalyon yang diberikan tugas pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia adalah Batalyon Infanteri Raider 301/PKS, yang bertugas menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan sektor timur Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, selama 9 bulan, mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai

dengan 30 November 2019. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis tentang bagaimana peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia.

Topik mengenai peran Satgas Pamtas dalam pengamanan wilayah perbatasan masih sangat jarang dibahas dan diangkat dalam sebuah penelitian yang bermuara pada publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Berbagai literatur yang sudah terbit dalam bentuk buku dan artikel jurnal dan ditulis oleh para akademisi di bidang pertahanan banyak yang memfokuskan pada peran TNI maupun peran TNI AD dalam mengamankan wilayah perbatasan secara umum dan makro saja, namun kurang menitik dan kurang menyoroti ke aspek khusus dan mikro, yakni mengkaji dan menganalisis peran Satgas Pamtas. Padahal, peran Satgas Pamtas ini sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga wilayah perbatasan dan langsung bersentuhan dengan dinamika persoalan di wilayah perbatasan.

Sepanjang pembacaan terhadap literatur penelitian tentang peran Satgas Pamtas dalam pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, ada satu artikel jurnal yang ditulis oleh Mayor Infanteri Hasan Abdullah M.Si (Han), tahun 2013, pada Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan, Vol. 3 No.1, dengan judul "*Peran dan Kapabilitas TNI Dalam Pengawasan Lintas Batas: Studi Kasus Kapabilitas Kompi Tempur I Yonif 631/Antang di Pulau Sebatik*". Tulisan ini mengangkat tentang bagaimana peran dan kapabilitas pasukan pengamanan perbatasan, yakni Kompi Tempur I Yonif 631/Antang dalam pengawasan lintas batas di wilayah Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. Namun, artikel yang ditulis oleh Mayor Infanteri Hasan Abdullah ini hanya membahas tentang Satgas Pamtas Yonif 631/Antang di wilayah perbatasan di Pulau Sebatik saja, bukan di wilayah perbatasan darat di Pulau

Kalimantan. Di samping itu, peran yang dibahas hanya dalam hal pengawasan pelintas batas, khususnya pelintas batas tradisional maupun pelintas batas untuk urusan pekerjaan, turisme, perdagangan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya, serta tidak membahas pengamanan dan pengawasan terhadap berbagai ancaman pemindahan/ perusakan batok batas maupun kejahatan transnasional lainnya. Tinjauan analisis juga lebih sempit, yakni analisis terhadap Kompi Tempur I saja dalam satuan Yonif 631/Antang, sedangkan peran Yonif 631/Antang secara keseluruhan tidak dibahas. Inilah yang menjadi perbedaannya. Sebagai informasi, Di dalam organisasi TNI AD, Satuan Batalyon terdiri dari beberapa satuan Kompi, sehingga Satuan Kompi merupakan bagian dari Satuan Batalyon.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengangkat dan menganalisis mengenai peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di wilayah sektor Timur Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Putusibau, serta kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya secara solutif dan praktis. Sumbangsih artikel ilmiah ini adalah sebagai saran masukan akademis kepada pemerintah, khususnya TNI dan TNI AD, untuk memberikan prioritas pada pengamanan wilayah perbatasan, terutama kepada setiap Satgas Pamtas TNI yang berjuang keras di wilayah perbatasan darat menjaga kedaulatan negara untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa negara hadir dan bertanggungjawab di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia.

Agar supaya sistematis, artikel ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama menganalisis mengenai teori peran sebagai pisau analisis untuk membedah peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Bagian kedua mengupas tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dan cara melakukan penelitian di lapangan. Bagian ketiga menganalisis tentang hasil dan pembahasan, yang didalamnya terdapat uraian mengenai sekilas Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS; kekuatan, kemampuan, dan gelar Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS; peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS; dan kendala yang dihadapi Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS, serta upaya yang digelar dalam mengamankan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Bagian keempat berisi kesimpulan yang konkret, empiris, dan aplikatif.

Teori Peran

Dalam mencari jawaban terhadap permasalahan tentang apa saja peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia (khususnya di perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat), pada penelitian ini, dipergunakan teori peran, yang didalamnya terdapat peran aktif dan peran partisipatif.

Dari literatur yang ada, peran adalah sikap, perilaku, dan perbuatan seseorang, kelompok atau organisasi yang dilakukan atas dasar norma, nilai, dan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya. Peran merupakan pengejawantahan dari tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau kelompoknya masing-masing. Peran bisa juga dikaitkan dengan posisi, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok di tengah masyarakat, sehingga seseorang ataupun kelompok tersebut melakukan sesuatu berdasarkan pada posisi atau kewenangannya tersebut. Peran merupakan implementasi dari sikap dan perilaku yang ada di tengah masyarakat tentang apa yang seharusnya dan apa yang semestinya dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 16), terdapat jenis-jenis peran yang dimainkan oleh suatu organisasi, yakni peran aktif dan peran partisipatif. Peran aktif merupakan suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi tertentu. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta kontribusinya terhadap suatu organisasi.

Peran aktif sangat terkait dengan tugas yang melekat dalam diri seseorang atau organisasi sehingga harus dilaksanakan. Peran aktif merupakan peran utama yang harus dilakukan agar supaya target organisasi tercapai, yang diukur dari keaktifan seseorang dalam suatu program atau kegiatan tertentu. Peran ini merupakan peran yang esensial dimainkan oleh suatu organisasi agar supaya pelaksanaan visi dan misi organisasi terwujud.

Peran partisipatif adalah suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat atau pada momentum tertentu saja. Peran partisipatif adalah peran yang bersifat tambahan, pendukung atau pelengkap dimana seseorang aktif dalam suatu kegiatan ketika ada kebutuhan, ada permintaan, dan dalam kondisi tertentu, yang mendorong seseorang tersebut berpartisipasi, terlibat dan berperan serta dalam suatu kegiatan tertentu.

Abu Ahmadi (1982: 19), menyatakan bahwa peran merupakan sesuatu yang kompleks berupa pengharapan manusia atau organisasi terhadap cara individu atau organisasi bersikap, bertindak, dan berbuat dalam konteks situasi dan kondisi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial di tengah masyarakat. Miftah Thoha (1997: 52), menegaskan bahwa peran timbul karena suatu jabatan, tugas, dan kewenangan yang melekat pada diri seseorang atau organisasi atau lembaga tertentu. Peran merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang normatif yang diberikan oleh aturan,

peraturan maupun perintah konsitusi yang harus dilaksanakan oleh individu dan organisasi tertentu.

Dalam konteks ini, peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia akan dilihat dalam perspektif teori peran, baik peran aktif maupun peran partisipatif, yang selama ini diperankan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS ketika bertugas menjaga, memelihara, dan mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, khususnya di perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Herdiansyah Haris (2010:13), metode kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami dan menjiwai suatu fenomena atau gejala dalam interaksi sosial secara alamiah dengan memprioritaskan pada jalinan komunikasi yang mendalam diantara peneliti dengan fenomena/ gejala/ peristiwa yang ditelitinya. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada huruf, kata dan kalimat untuk mengungkap makna di balik angka dan fenomena atau peristiwa (*verstehen*), sehingga akan didapatkan hasil analisis yang kredibel, fokus, detail, valid, dan mendalam (Subagyo, 2020: 24).

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang difokuskan pada individu dan lembaga secara terperinci, detail, dan intensif dengan obyek yang kecil dan sempit, sehingga akan dapat menghasilkan deskripsi suatu gejala secara jelas dan obyektif (Danim, 2002).

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi / studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada para informan yang berasal dari Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS, pada level

perwira, bintara, dan tamtama, yang terlibat langsung dalam penugasan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Adapun informan yang diwawancarai adalah: (1) Komandan Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS, Letkol Inf Andi Hasbulah; (2) Dankima Yonif Raider 301/PKS, Lettu Arh Fitra Juni Awan; (3) Dan SSK I Yonif Raider 301/PKS, Lettu Inf Yon Andreas; (4) Dan Pos Yonif Raider 301/PKS, Sertu Muhammad Haris; (5) Takom Yonif Raider 301/PKS, Praka Agus Adhiwijaya. Observasi dilakukan ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Studi dokumentasi dilakukan melalui pencarian dokumen maupun pustaka baik dari buku, jurnal, laporan penelitian, dan internet.

Selain itu, dilakukaan pula FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel sehingga akan menemukan *novelty* (kebaruan) penelitian. FGD dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait (*stake holders*) agar supaya data yang didapatkan representatif dan mewakili semua lapisan populasi. Adapun pihak yang terlibat dalam FGD adalah dari Mabes TNI (Kolonel Inf Agung Zamawi), Mabes TNI AD (Letkol Inf Tatang Suartana), Seskoad (Kolonel Inf Muharman), Sesko TNI (Kolonel Kav Irman Gama), dan Dislitbang (Kol Czi Widijo). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data dan *member check* secara teliti dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS

Dalam perspektif keamanan di wilayah perbatasan, banyak sekali ancaman-ancaman luar negeri yang dihadapi oleh Batalyon Infanteri Raider 301/Prabu Kian Santang (Yonif Raider 301/PKS), seperti penyelundupan barang-barang, penyelundupan obat-obatan,

pencurian kayu ilegal (*illegal logging*), pencurian batu bara/ pertambangan ilegal (*illegal mining*), dan penyelundupan tenaga kerja.

Ancaman tersebut berbahaya bagi masyarakat sekitar di wilayah perbatasan karena maraknya narkoba dan miras di tengah masyarakat, khususnya anak muda yang terkontaminasi narkoba dan miras karena mudah didapat dari selundupan dan harganya cenderung murah. Hal ini juga mengancam kedaulatan wilayah dan kedaulatan ekonomi Indonesia karena barang-barang selundupan tidak melalui bea cukai. Penyelundupan tenaga kerja juga tidak melalui pihak imigrasi sehingga tidak memiliki dokumen imigrasi, serta hilangnya potensi kerugian miliaran rupiah dari pencurian kayu dan pencurian batu bara di wilayah perbatasan. Realitas ancaman dari luar negeri inilah yang kemudian mesti dihadapi oleh Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS.

Batalyon Infanteri Raider 301/Prabu Kian Santang (Yonif Raider 301/PKS) adalah satuan tempur TNI AD yang berada di bawah organik Korem 062/Tarumanagara, dan di bawah kendali Kodam III/Siliwangi, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Yonif Raider 301/PKS terbentuk menjadi satuan tempur Raider pada tahun 2018, melalui proses pelatihan Raider yang keras dan berat di Pusdikpassus Batu Jajar dan Pusdikpassus Cilacap.

Sebagai satuan tempur yang telah berpengalaman di medan penugasan, satuan Yonif Raider 301/PKS diberikan amanat untuk menjadi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamantas) darat Indonesia-Malaysia di sektor timur wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan darat di bawah koordinasi operasi Kodam XII/Tanjung Pura.

Dasar pelaksanaan tugas operasi pengamanan perbatasan ini tertuang dalam Surat Perintah Pangdam

XII/Tanjung Pura, Nomor: Sprin/280/II/2019, tanggal 15 Februari 2019 Tentang Perintah Untuk Melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2019–30 November 2019 atau selama kurang lebih Sembilan bulan.

Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di sepanjang garis perbatasan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan tugas pokok, antara lain: (1) Memelihara dan meningkatkan kewibawaan pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; (2) Menjamin keutuhan wilayah dengan tidak terjadinya pergeseran atau hilangnya atau rusaknya patok batas; (3) Melaksanakan operasi pemberdayaan wilayah pertahanan di kawasan perbatasan darat; (4) Mencegah terjadinya pelanggaran, kegiatan ilegal, penyelundupan senjata dan bahan peledak; (5) Melaksanakan tugas-tugas lain di wilayah perbatasan darat sesuai petunjuk komando atas.

Adapun wilayah penugasan Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS di perbatasan darat Indonesia-Malaysia dapat digambarkan dalam bentuk peta sebagai berikut:



Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Gambar 1.
Wilayah Operasi Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS

Kekuatan dan Gelar Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS

Kekuatan Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS yang diberangkatkan ke wilayah penugasan di perbatasan darat sektor timur Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 450 personil, yang terdiri dari unsur

perwira, bintara, dan tamtama, yang terbagi dalam Satuan Setingkat Kompi (SSK) I, II, III, IV, dan Markas Satgas (Masatgas). Adapun kekuatan rinci dari Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Kekuatan Personil Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS

No.	Nama Pos	Jumlah Personil
1.	Markas Satgas	90
2.	Satuan Setingkat Kompi (SSK) I	86
3.	Satuan Setingkat Kompi (SSK) II	100
4.	Satuan Setingkat Kompi (SSK) III	94
5.	Satuan Setingkat Kompi (SSK) IV	80
Total		450

Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

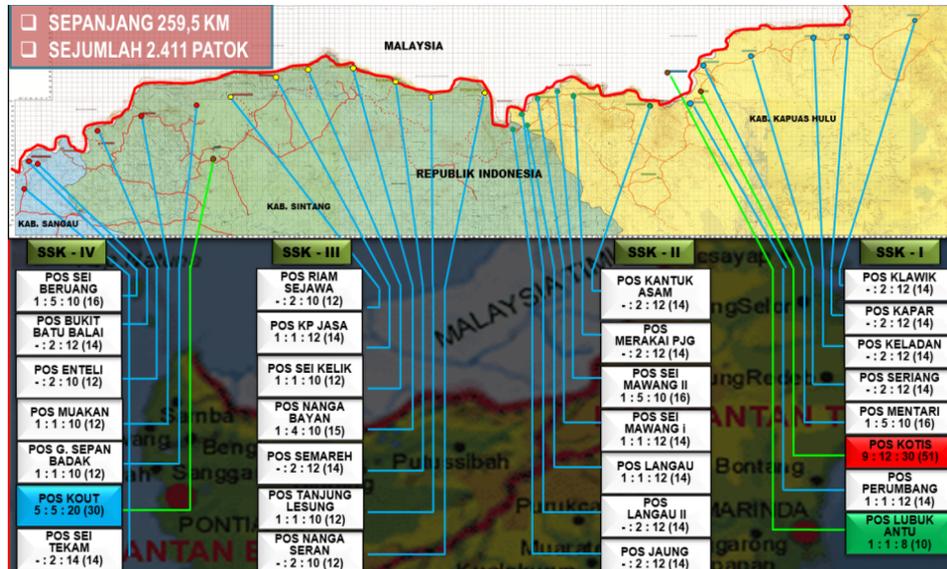
Sedangkan gelar Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dilakukan pada sepanjang 259,5 KM di garis perbatasan darat Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan jumlah patok batas yang diamankan sekitar 2.411

patok. Gelar kekuatan Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS saat ini masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya pos-pos pengamanan perbatasan darat dibandingkan dengan panjangnya wilayah perbatasan darat dan jumlah personil di berbagai titik rawan di

wilayah perbatasan darat tidak sebanding dengan jangkauan wilayah perbatasan darat yang sangat luas, sehingga berdampak pada masih maraknya pelintas batas ilegal dan kejahatan lintas batas

antarnegara yang sulit sekali dicegah dan ditangkal.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang gelar Pos Pamtas Satgas Yonif Raider 301/PKS dapat ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Gambar 2.

Gelar Pos Pamtas Yonif Raider 301/PKS

Peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS

Peran yang dimainkan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia di wilayah sektor timur (Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu) adalah peran yang bersifat aktif dan peran yang bersifat partisipatif. Hal ini didasarkan pada teori peran menurut Soerjono Soekamto bahwa peran yang ditampilkan dan dimainkan oleh suatu organisasi dapat terwujud pada peran aktif dan partisipatif.

Adapun peran aktif dari Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS berupa pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman militer dan non-militer, seperti pengamanan yang dilakukan Satgas Pamtas terhadap patok batas, pelintas batas tradisional dan ilegal, ancaman kejahatan transnasional, *illegal logging*, *illegal mining*,

kejahatan narkoba, dan penyelundupan manusia dan barang.

Dalam operasi intelijen yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS diperoleh hasil operasi berupa penemuan dan penyitaan senjata rakitan laras pendek dan laras panjang, amunisi dan bahan peledak, minuman keras, penangkapan TKI ilegal, dan penyitaan sembako. Operasi intelijen ini dilakukan Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS secara rutin di berbagai wilayah yang dinilai rawan terjadinya berbagai kejahatan di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS melakukan operasi intelijen secara profesional dengan melibatkan semua instansi terkait yang berkepentingan dan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat apabila ditemukan kasus/ kejahatan/ tindak pidana umum yang langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses

secara hukum pidana. Hasil operasi intelijen yang digelar oleh Satgas Pamtas

Yonif Raider 301/PKS dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.

Hasil Operasi Intelijen di Wilayah Perbatasan Darat

No.	Jenis	Jumlah
1.	Senjata Rakitan <ul style="list-style-type: none"> • Laras Panjang • Laras Pendek 	39 Pucuk 2 Pucuk
2.	Muhandak <ul style="list-style-type: none"> • Munisi TJ Kal 9 MM • Munisi Tabur Kal 12 MM • Granat Tangan 	3 Butir 63 Butir 1 Butir
3.	Minuman Keras <ul style="list-style-type: none"> • Arak Putih • Benson • Arak Likwer • Arak Glenfond • Kingsway • Bir Snow • Lemon Gin • Brandy 	195 Liter 148 Botol 12 Kendi 12 Botol 792 Kaleng 1.032 Kaleng 64 Botol 77 Botol
4.	Pakaian Bekas	17 Karung
5.	Mesin Speed Boat	3 Buah
6.	Rokok M2	19.200 Batang
7.	TKI Ilegal	14 Orang

Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Selanjutnya, Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS melakukan patroli yang digelar melalui patroli patok, patroli pilar TNBK, patroli koordinasi TNI-TDM (Tentara Diraja Malaysia), dan patroli jalan tidak resmi di berbagai jalan tikus maupun jalan alternatif menuju akses perbatasan, yang sangat rawan terjadinya aksi kejahatan transnasional maupun infiltrasi asing. Patroli yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dilakukan secara rutin, terkoordinasi, dan profesional, dimana Patroli yang dilakukan

selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa adanya tindakan kekerasan yang brutal serta patrol selalu dilakukan secara humanis, berperikemanusiaan, dan persuasif. Bahkan, patroli bersama antara TNI dan TDM bermanfaat karena bisa saling mengenal antarangkatan bersenjata yang berbeda sehingga meningkatkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Adapun rincian detail hasil operasi patroli yang digelar Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS bisa ditampilkan di bawah ini:

Tabel 3.

Hasil Operasi Patroli di Wilayah Perbatasan Darat

No.	Jenis	Jumlah
1.	Patroli Patok (2.411 Patok): Patok No 1.515 berhasil ditemukan <ul style="list-style-type: none"> • Baik • Rusak • Hilang 	2.171 Patok 88 Patok 152 Patok
2.	Patroli Pilar TNBK <ul style="list-style-type: none"> • Jarak • No Patok • Baik • Rusak • Hilang 	50.028 KM S.800-S.1300 355 Patok 41 Patok 72 Patok
3.	Patroli Koordinasi TNI-TDM SIRI I 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Patroli Patok • No Patok 	125 Patok I.476-I.590
4.	Patroli Jalan Tidak Resmi (32 Jalan) <ul style="list-style-type: none"> • SSK I • SSK II • SSK III • SSK IV • Pos Gabma Lubuk Antu 	8 Jalan 9 Jalan 6 Jalan 5 Jalan 8 Jalan

Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Sementara itu, peran partisipatif yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS berupa kegiatan pendukung, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang berupa misi sipil (*civic mission*), seperti membantu dalam bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Dalam konteks TNI, peran partisipatif ini dikenal dengan kegiatan pembinaan teritorial dengan nama kegiatan bhakti sosial, komunikasi sosial (Komsos), pembinaan ketahanan wilayah (Bin Tah Wil), dan karya bhakti.

Kegiatan bhakti sosial yang digelar Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat perbatasan, menggelar sosialisasi kamtibmas masyarakat perbatasan, mengajar di sekolah, dan evakuasi korban bencana, maupun kegiatan sosial kemanusiaan / kemasyarakatan lainnya sehingga terjalin dan terbangun kemandirian TNI dengan rakyat di wilayah perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Gambar 3.

Kegiatan Bhakti Sosial di Wilayah Perbatasan Darat

Kegiatan komunikasi sosial (Komsos) yang digelar Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia adalah membantu pengobatan masyarakat di Puskesmas karena keterbatasan dokter dan perawat, kegiatan sunatan massal, operasi katarak massal, maupun anjangsana dan silaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di tengah masyarakat di wilayah perbatasan darat. Selain itu, kegiatan komunikasi sosial yang digelar Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, Ormas, LSM, OKP, karang taruna, maupun semua organisasi yang ada di tengah masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan memberikan kesadaran masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati karena hidup

di wilayah perbatasan antarnegara yang rawan terjadinya berbagai infiltrasi asing maupun ancaman kejahatan transnasional lainnya yang setiap saat mengancam di tengah masyarakat.

Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS ini mendapatkan sambutan positif dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, komunitas bisnis, maupun tokoh-tokoh adat yang selalu memberikan dukungan, baik dukungan informasi maupun dukungan lainnya untuk Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam menjalankan komunikasi sosial sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia.

Berikut ini adalah gambar berupa foto kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia:



Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Gambar 4.
Kegiatan Komunikasi Sosial di Wilayah Perbatasan Darat

Kegiatan pembinaan ketahanan wilayah (Bin Tah Wil) yang digelar Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia adalah melakukan pembinaan kepramukaan terhadap siswa dan pelajar, pembinaan baris-berbaris, pembinaan upacara bendera, membina karang taruna, maupun mengenalkan masyarakat terhadap bela negara untuk menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Kegiatan pembinaan ketahanan wilayah yang digelar oleh Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perbatasan akan pentingnya menjaga nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air dan semangat juang sebagai bagian dari pendidikan bela negara. Masyarakat perbatasan harus diberikan pemahaman tentang nilai-nilai bela negara agar supaya memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari NKRI.

Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS meyakini bahwa kegiatan pembinaan ketahanan wilayah kepada masyarakat,

terutama pelajar dan mahasiswa, akan mampu menciptakan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi ancaman baik ancaman militer maupun ancaman non-militer di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang tanpa mengenal batas antar negara.

Harapannya, gelar pembinaan ketahanan wilayah akan mampu menghasilkan para pemuda perbatasan yang tangguh, militan, dan memiliki semangat juang tinggi yang dapat dijadikan bekal dan modal dalam menghadapi perang semesta di wilayah perbatasan jika kelak terjadi. Hal ini sebagai bagian dari pembentukan pasukan atau komponen cadangan yang akan mendukung komponen utama (TNI) dalam menerapkan sistem pertahanan semesta sebagai implementasi dari doktrin pertahanan dan keamanan Indonesia.

Serangkaian kegiatan dalam pembinaan ketahanan wilayah yang dilaksanakan oleh Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS ini dapat divisualisasikan dalam gambar berikut ini:



Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Gambar 5.

Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah di Wilayah Perbatasan Darat

Kegiatan karya bhakti yang digelar Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia adalah pemeliharaan rumah adat, pemeliharaan gedung sekolah, perbaikan gereja, renovasi tugu garuda, perbaikan saluran, rehabilitasi masjid, dan pemeliharaan rumah pintar bagi masyarakat sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS menyadari bahwa wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia merupakan wilayah terbelakang, wilayah tertinggal dan wilayah pinggiran yang kondisi infrastruktur fisiknya sangat memprihatinkan baik jalan, jembatan, fasilitas sosial, maupun fasilitas umum lainnya sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Gelar karya bhakti yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS merupakan sumbangsih dari TNI AD untuk pembangunan masyarakat setempat

sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat didukung dengan baik. Kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan yang buruk akan berdampak pada pembangunan ekonomi, khususnya aktivitas ekonomi masyarakat yang terhambat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di wilayah perbatasan. Konsekuensi logis berikutnya adalah pembangunan daerah yang buruk atau rendah akan menimbulkan kejahatan dan aksi kriminalitas yang pada gilirannya akan berdampak pada instabilitas keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS menyadari akan hal itu, sehingga dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan selalu menggelar operasi karya bhakti di tengah masyarakat perbatasan.

Adapun bukti dari kegiatan karya bhakti tersebut dapat disaksikan pada gambar berikut ini:



Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Gambar 6.
Kegiatan Karya Bhakti di Wilayah Perbatasan Darat

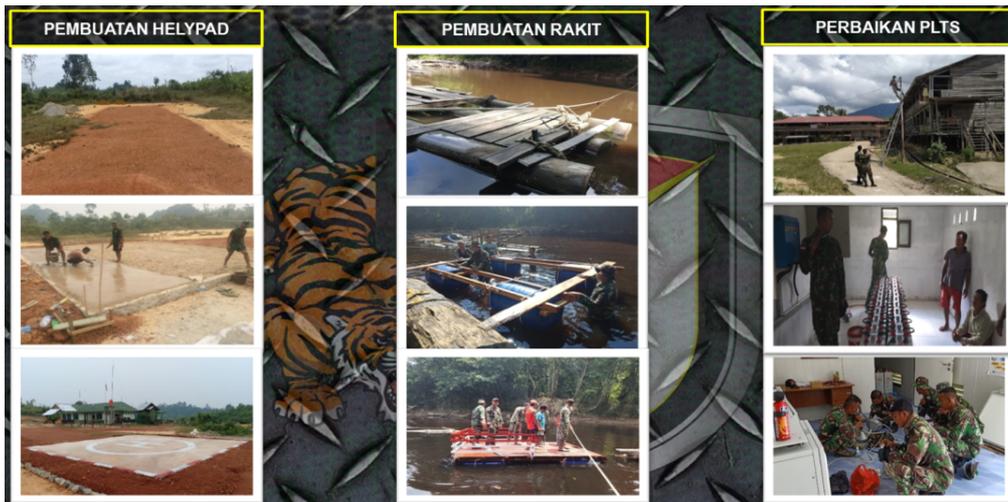
Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik yang digelar Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia adalah melaksanakan pembangunan helipad, pembuatan rakit, dan perbaikan PLTS yang sangat penting bagi masyarakat perbatasan. Rakit merupakan alat transportasi sungai yang sangat vital bagi penduduk perbatasan, sementara perangkat PLTS sangat dibutuhkan untuk aliran listrik di permukiman warga. Helipad diperlukan untuk bantuan sembako maupun transportasi sipil dan militer untuk memasok barang kebutuhan pokok dan sembako yang membutuhkan kecepatan pengiriman untuk keperluan sehari-hari.

Dalam melakukan operasi karya bhakti, Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS selalu berkoordinasi dengan semua pihak terkait, khususnya pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta menggandeng BUMN maupun BUMS yang ada di wilayah perbatasan sebagai bagian dari sinergi antara TNI dengan semua pemangku kepentingan. Karya bhakti juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dan diberdayakan sejak masa persiapan, pembangunan,

sampai dengan peresmian infrastruktur yang dibangun agar masyarakat merasa memiliki dan memelihara karena ikut terlibat dalam proses pembuatan atau pembangunannya. Inilah pembangunan partisipatif yang dijalankan oleh Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS.

Kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia ini bermanfaat masyarakat perbatasan karena bisa mendukung banyak aktivitas masyarakat, seperti pembangunan rakit, perbaikan PLTS, renovasi jamban, renovasi saluran pembuangan, maupun fasilitas keagamaan. Masyarakat menyambut baik kehadiran Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS yang berada di tengah masyarakat. Kecintaan masyarakat perbatasan terhadap personil Satgas Pamantas Yonif Raider 301/PKS dibuktikan saat mereka semua berpamitan kepada masyarakat saat pelaksanaan tugas telah selesai. Masyarakat memberikan apresiasi dan merasa sedih karena kebersamaan selama sembilan bulan sangat dirasakan oleh masyarakat perbatasan.

Dokumentasi pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pengabdian dan peran sosial kemasyarakatan ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Sumber: Batalyon Infanteri Raider 301/PKS (2020).

Gambar 7.
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Darat

Kendala Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS

Dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS menghadapi beragam kendala. Kendala pertama adalah integrasi dengan aparat intelijen wilayah dan aparat komando wilayah masih kurang optimal. Mekanisme “*sharing*” informasi kepada Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS masih kurang sehingga Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS kekurangan informasi intelijen dan harus mencari dan mengumpulkan data intelijen sendiri. Masih kurangnya mekanisme koordinasi antaraparat keamanan dan aparat intelijen membuat pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan kurang dapat berjalan dengan lebih optimal.

Kendala kedua adalah terlalu banyak jalan-jalan setapak yang dapat digunakan masyarakat untuk perlintasan keluar dan masuk wilayah RI yang tidak terdapat pos Satgas Pamtas sehingga menyulitkan pemantauan secara langsung dan berpotensi menimbulkan terjadinya aksi pelintas batas illegal, penyelundupan barang, maupun peredaran narkoba. Kendala ketiga adalah selalu bergantinya

modus operasi yang dimainkan para pelintas batas ilegal dan para penyelundup sehingga mempersulit Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan darat. Para pelaku penyelundupan dan pelintas batas ilegal sering memanfaatkan kelengahan personil satgas Pamtas.

Kendala keempat, Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS tidak memiliki alat metal detektor pada saat kegiatan *sweeping* di pos lintas batas maupun di berbagai jalan menuju akses ke wilayah perbatasan darat, sehingga penyelundupan barang-barang ilegal dan narkoba sulit sekali terdeteksi. Personil Satgas Pamtas melakukan pemeriksaan secara manual tanpa bantuan perangkat teknologi. Kendala kelima, masih dirasakan sulitnya komunikasi antar-Pos Pamtas baik karena cuaca maupun karena beberapa radio yang rusak. Selain itu, sebanyak 25 pos tidak memiliki jaringan telepon seluler. Kendala keenam adalah beberapa pos berada jauh dari masyarakat yang berefek pada waktu tempuh, seperti waktu tempuh delapan jam untuk mengakses pos Tanjung Lesung dan sepuluh jam untuk menuju ke pos Nangsa Seran.

Upaya untuk mengatasi kendala dan rintangan yang dihadapi oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS adalah: (1) Satgas Pamtas membentuk jaring intelijen di setiap wilayah pos-pos Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia agar memperoleh informasi mengenai kondisi terkini; (2) memerintahkan para komandan pos untuk lebih meningkatkan kegiatan *sweeping* dan *screening* terutama di jalur-jalur tidak resmi menuju wilayah perbatasan darat; (3) melaksanakan pemeriksaan rutin secara manual maupun dengan perangkat teknologi terhadap serangkaian kendaraan, orang, dan barang bawaan yang keluar dan masuk wilayah Indonesia guna mencegah terjadinya berbagai bentuk kegiatan pelanggaran ilegal; (4) mengajukan usulan kepada komando atas serta melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara manual dan memanfaatkan alat teknologi untuk mendeteksi barang-barang ilegal yang diselundupkan di wilayah perbatasan darat; (5) memperbaiki perangkat radio yang rusak sembari menunggu proses pengadaan dari komando atas; (6) membangun helipad di pos-pos aju yang sulit diakses dengan jalan darat sehingga bisa diakses melalui udara dengan helikopter untuk suplai logistik maupun perbekalan lainnya.

Di samping itu, proyeksi gelar kekuatan Satgas Pamtas kedepan di perbatasan darat Indonesia-Malaysia harus memperhatikan aspek luas wilayah, akses menuju perbatasan, maupun kondisi pos Pamtas. Ke depan, perlu dibangun berbagai pos Pamtas tambahan di wilayah rawan kejahatan lintas batas, adanya pemanfaatan teknologi CCTV dan Drone di wilayah rawan, dan pembangunan satuan organik TNI AD di wilayah perbatasan. Perlu dipikirkan pula adanya penambahan jumlah/ kuantitas personel Satgas Pamtas di wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia yang mampu digerakkan secara cepat ke berbagai titik rawan di perbatasan darat untuk menggelar operasi pengamanan perbatasan darat sehingga

dapat mendeteksi, mencegah, menangkal, dan menindak berbagai kejahatan transnasional di wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia.

Dalam aspek pangkalan, dibutuhkan pembangunan dan penambahan pos-pos Pamtas yang lengkap dan ideal dan terstandarisasi di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tugas pokok Satgas Pamtas untuk berperan aktif dan partisipatif di wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia. Dalam aspek peralatan teknologi informasi dan komunikasi, penting untuk memanfaatkan penggunaan sarana pendukung / peralatan teknologi informasi komunikasi, seperti CCTV dan drone, yang dapat menimbulkan *deterrence effect* dalam rangka mengurangi terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan darat dan meminimalisir terjadinya aktivitas kriminal seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia, serta dapat mengefisienkan pemberdayaan SDM sehingga pelaksanaan tugas dapat dimaksimalkan.

Pada aspek peralatan transportasi, perlu perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana transportasi yang dibutuhkan oleh Satgas Pamtas, khususnya kendaraan bermotor maupun helikopter untuk memudahkan *dropping* pasukan, dorongan logistik, dan evakuasi personil ke pos-pos yang tidak terjangkau melalui jalur darat, sehingga akan dapat mengamankan wilayah perbatasan darat dari ancaman kejahatan transnasional maupun untuk mendukung operasi kemanusiaan, bhakti sosial, maupun misi sosial di tengah masyarakat perbatasan.

Melihat kendala yang dihadapi oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS tersebut, sangat penting untuk dipikirkan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bekal bagi setiap Satgas Pamtas yang bertugas di setiap wilayah perbatasan Indonesia. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting mengingat kondisi medan

perbatasan yang sangat terjal dan sulit diakses oleh personil Satgas Pamtas dengan peralatan yang manual dan konvensional sehingga memerlukan peralatan canggih. Tentunya, peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih ini sangat memerlukan pembiayaan dan anggaran yang besar sehingga perhatian pemerintah dan DPR sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh setiap Satgas Pamtas di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Di perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dinamika kompleksitas ancaman yang bersifat fluktuatif memerlukan upaya pengamanan yang serius dan intensif. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas dan fungsi menjaga kedaulatan wilayah di wilayah perbatasan. Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS diberikan amanat untuk menjalankan pengabdian di tapal batas wilayah Indonesia-Malaysia, terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kapuas Hulu (sektor timur Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat). Peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam menghadapi tren dan eskalasi perkembangan ancaman yang terjadi di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, khususnya di sektor

timur wilayah Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan tugas Satgas Pamtas dalam memainkan peran aktif dan peran partisipatif.

Saran yang dapat ditawarkan adalah perlunya penambahan personil di wilayah perbatasan saat melaksanakan tugas pengamanan perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia sehingga dapat menjangkau semua titik rawan adanya ancaman militer maupun non-militer. Diperlukan pula pemenuhan perlengkapan sarana prasarana, peralatan teknologi informasi-komunikasi, termasuk peralatan Drone yang dapat mendeteksi semua titik rawan yang sulit dijangkau oleh personil di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Pembangunan pos Pamtas juga sangat diperlukan penambahan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kuantitas, ditambah lagi pos Pamtas di sepanjang wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia sehingga memudahkan pengawasan dan pemantauan kejahatan lintas batas maupun kejahatan umum lainnya. Secara kualitas, diperlukan standarisasi pos Pamtas. Pos Pamtas harus dibangun dengan standar minimal Pos Pamtas harus tersedia alat telekomunikasi, radar, toilet, dapur, maupun helipad untuk memudahkan personil dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hasan. (2013). Peran dan Kapabilitas TNI Dalam Pengawasan Lintas Batas: Studi Kasus Kapabilitas KOMPI Tempur I Yonif 631/Antang di Pulau Sebatik. *Jurnal Pertahanan*, 3(1), 83-111. DOI: <http://dx.doi.org/10.33172/jpb.h.v3i1.377>
- Ahmadi, Abu. (1982). *Pengantar Organisasi Sosial: Perspektif Akademik dan Praktis*. Jakarta: Pustaka Media.
- Batalyon Infanteri Raider 301/PKS. (2020). *Laporan Satuan Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS*, Majalengka.
- Haris, Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Humanika.
- Hidayat, Muhammad Nizar. (2015). Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 92-103. DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v4i2.410>.
- Muhtadi, Muhtadi. (2017). *Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Pusat*

- Pertumbuhan Ekonomi*. Bandung: Media Press.
- Mukhtar, Sidratahta. (2016). *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya*. Bandung: Alfabeta.
- Seskoed. (2007). *Kajian Pembangunan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia dari Perspektif Keamanan dan Kesejahteraan*. Bandung: Penerbit Jianbang Seskoed.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Thoha, Miftah. (1997). *Dasar Manajemen Kebijakan Publik: Telaah Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yani, Yanyan M & Nizmi, Yusnarida Eka. (2018). Penerapan Konsep *Cross Border Regions (CBRs)* dalam Kerja Sama Ekonomi Sub-regional *Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT)*. *Insignia Journal of International Relations*, 5(1), 31-45. DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ins.2018.5.1.819>.
- Adhiwijaya, Agus. (2020, 11 Januari). Wawancara. (Agus Subagyo, Pewawancara).
- Awan, Fitra Juni. (2020, 13 Januari). Wawancara. (Agus Subagyo, Pewawancara).
- Andreas, Yon. (2020, 11 Januari). Wawancara. (Agus Subagyo, Pewawancara).
- Haris, Muhammad. (2020, 14 Januari). Wawancara. (Agus Subagyo, Pewawancara).
- Hasbulah, Andi. (2020, 10 Januari). Wawancara. (Agus Subagyo, Pewawancara).